

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, 2005
- Eka N.A.M Sihombing, 2020, *Politik Hukum*, Medan: Enam Media
- Firdaus Arifin, Fabian Riza Kurnia, 2019, *Penjabat Kepala Daerah*, Yogyakarta: Thafa Media
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006),
- Nasrullah Dan Tanto Lailam, 2019. *Politik Hukum Pilkada Dan Desain Badan Peradilan Khusus*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Ubaedillah, A. *Pendidikan kewarganegaraan Pancasila, demokrasi dan pencegahan korupsi*. Prenada Media, 2016.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sri Kusriyah, *Ilmu Negara*, Semarang: UNISSULA Press, 2017
- Wilma Silahi, 2020, *Demokrasi, Pilkada, Dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi*, Depok: RajaGrafindo Persada

### Jurnal :

- Abustan, Abustan. "Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 2.3 (2022).
- Amar Wahyudi, dkk., *Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Vol. 3 No. 3, *Mendapo*, 2022,
- Andriansyah, 2015, *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Analisa*, Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015
- Basuki, Udiyo. "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi."
- Evendia, Malicia. "Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6.3 (2012).
- Humaira, Annisa. "Konsep Negara Demokrasi." (2021).

- Hanifia, Yunastiti. Analisis Kekalahan Pasangan Soemarno-Zber Dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2015. Diss. Faculty of Social and Political Sciences, 2018.
- Hadi, Syofyan. "Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*
- Kelibay, Ismed, et al. "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*
- Kristiyanto, Eko Noer. "Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1.3 (2012)
- Kurniawan, Gadug. "Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi." *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2015).
- Kusuma, Mochammad Tommy, Elva Imeldatur Rohmah, and Nafi Mubarak. "Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*
- Lydia Amalia Rahmasari, "Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Penjabat Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sebagai Akibat Dari Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2024 Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota" (2022)
- Mahardika, Ahmad Gelora, Sun Fatayati, and Ferry Nahdian Furqan. "Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 2.2 (2022)
- Mashuri, Mashuri. "Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi." *Menara Riau* 13.2 (2014): 178-186.
- Nasrullah dan Tanto Lailam, 2019, Politik Hukum Pilkada & Desain Badan Peradilan Khusus, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Nuh, Muhammad Syarif. "Hakikat pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan." *Masalah-Masalah Hukum* 41.1 (2012)
- Oktavianus, Antonius. "Demokrasi." (2021).
- Qoroni, Waisol, and Indien Winarwati. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia." *INICIO LEGIS* 2.1 (2021).
- Rahayu, Widyanti Kusuma . "Problematika Yuridis Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota" *NOVUM: JURNAL HUKUM* 3.3 (2016)

Rauf, Rahyunir. "Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya." (2018).

Savitri, Indira Putri, and Reiza Wirambra. Politik Hukum Lahirnya Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2020.

Widad, Zaqil. "PARAMETER DEMOKRASI DALAM PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH." *At-Tanwir Law Review* 3.1 (2023)

### **Undang-Undang :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5587)

Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara No. 5679)

Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang atas undang undang No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota, menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara No. 6109)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 92 Tahun 2008)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 824)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota.

#### **Website**

[Bupati - Kompasiana.com](#), diakses pada tanggal 21 Juni 2023

[Bupati Adipati Berikan Materi Kepemimpinan Kepada Murid SD Lazuardi GSC Cinere \(waykanankab.go.id\)](#), diakses pada tanggal 21 Juni 2023

[Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia - Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. - Google Buku](#), diakses pada tanggal 15 Juni 2023

[Kepala Daerah Habis Masa Jabatan 2022, 2023, dan 2024 – Kompaspedia](#), diakses pada tanggal 6 September 2023

[Pemilihan Kepala Daerah \(PILKADA\) \(kajianpustaka.com\)](#), diakses pada tanggal 15 Juni 2023

[Penjabat Kepala Daerah dan Tantangan Menjalankan Kewenangannya \(hukumonline.com\)](#), diakses pada tanggal 18 Juni 2023

[Perlu Adanya Aturan Teknis Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah \(hukumonline.com\)](#), diakses pada tanggal 19 Januari 2024

[Tito Resmi Lantik 9 Pj Gubernur Hari Ini untuk Jabar hingga Papua \(cnnindonesia.com\)](#), diakses pada tanggal 11 November 2023